

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Bunga Novitasari¹; Andi Manggala Putra^{2*} dan Akhmad Saebani³

Afiliasi

¹²³ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Koresponden

*andimanggalaputra@upnvj.ac.id

Artikel Tersedia Pada

<http://jurnalwahana.aaykpn.ac.id/index.php/wahana/index>

DOI:

<https://doi.org/10.35591/wahana.v24i1.262>

Sitasi:

Novitasari, B., Putra, A. M., & Saebani, A. (2021). Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 24 (1), 60-78.

Artikel Masuk

12 September 2020

Artikel Diterima

05 Januari 2021

Abstract. *This study aims to examine the turnover of the board of commissioners, board of directors, audit committee, and independent board of directors on the disclosure of sustainability reports. In this study turnover was measured using member recruitment and member removal.*

The sample in this study amounted to 135 samples from 45 financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the 2016-2018 period. The analysis technique used is panel data regression analysis using STATA 13. The results of this study found that the recruitment of the board of commissioners, the board of directors, and the audit committee have a significant effect on disclosure of sustainability reports. The recruitment of an independent board of directors has no significant effect on disclosure of sustainability reports. While the removals of board of commissioners and directors have no effect. This study provides a new understanding of corporate governance in which the recruitment of members of the board of commissioners and directors will affect the disclosure of corporate sustainability reports. This study uses a new measure, that is the recruitment and removal of members of the board of commissioners and directors.

Keywords: *Board of Commissioners Turnover, Board of Directors Turnover, Audit Committee Turnover, Independent Board of Directors Turnover, Sustainability Reports Disclosure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pergantian dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan direksi independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dalam penelitian ini pergantian diukur menggunakan penambahan anggota dan pengurangan anggota. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 135 sampel yang berasal dari 45 perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan STATA 13. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa penambahan dewan komisaris, penambahan dewan direksi, dan penambahan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penambahan dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pengurangan dewan komisaris, pengurangan dewan direksi, pengurangan komite audit, dan pengurangan dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Kata Kunci: Pergantian Dewan Komisaris, Pergantian Dewan Direksi, Pergantian Komite Audit, Pergantian Dewan Direksi Independen, Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Pendahuluan

Keberlanjutan (*Sustainability*) menjadi isu hangat yang diperbincangkan di dunia seiring dengan meningkatnya permasalahan kerusakan lingkungan dan penggundulan hutan yang mengakibatkan polusi udara, air, dan tanah serta perubahan iklim akibat dari pembangunan yang tidak ramah lingkungan (Safitri & Saifudin, 2019). Arah dari keberlanjutan adalah memastikan generasi penerus di masa depan mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya serta meneruskan kehidupan di masa mendatang. Untuk menilai aktivitas keberlanjutan perusahaan di bidang non-keuangan dilakukan dengan menggulirkan tanggung jawab sosial.

Di Indonesia telah ada peraturan yang berkaitan erat dengan implementasi berkelanjutan, yaitu diatur dalam UU No. 40 (2007) Pasal 74(1) menerangkan pada dasarnya aktivitas operasional perseroan yang berkaitan erat dengan kekayaan alam maka wajib melaksanakan tanggung jawab terhadap lingkungan. Lalu POJK No. 51 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan (2017). Meskipun peraturan mengenai keberlanjutan telah diterbitkan, namun jumlah pengungkapan laporan keberlanjutan tidak setara dengan jumlah perusahaan yang ada (Adhipradana & Daljono, 2014).

Dengan adanya POJK mengenai penerapan keuangan berkelanjutan, sektor keuangan di Indonesia mulai diminta untuk mengikutsertakan pertimbangan efektivitas manajemen risiko sosial dan lingkungan dalam proyek yang mereka dukung pendanaannya, sejauh apa proyek tersebut berkontribusi untuk bisnis yang lebih hijau (*greener*), ramah iklim (*climate friendly*), dan mengikut sertakan elemen sosial (*socially inclusive*). Keberlanjutan tidak hanya terbatas pada konsep lingkungan tetapi juga terkait ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana perusahaan bisa membangun masyarakat sejahtera dalam konteks komunitas (Beritasatu.com, 2020).

Pada tahun 2019, terdapat beberapa kasus pada sektor keuangan yang menyangkut tata kelola perusahaan. Sektor keuangan sangat rawan dengan tindak pidana korupsi karena berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana berbasis kepercayaan dari nasabahnya, sehingga diperlukan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian yang menganalisis tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan keberlanjutan telah banyak dilakukan. Studi yang dilaksanakan oleh Solikhah & Winarsih (2016) dan Diono et al. (2017) hasilnya adalah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya penelitian tentang pengaruh dewan direksi terhadap laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh Idah (2013); Shamil et al. (2014); Sinaga & Fachrurrozie (2017) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemudian Sari & Marsono (2013) dan Safitri & Saifudin (2019) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Studi mengenai pengaruh dewan direksi independen terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh Amran et al. (2014) bahwa dewan direksi independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Telah dilakukan riset terdahulu yang menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan laporan keberlanjutan yang menggunakan pengukuran jumlah rapat dan jumlah anggota, tetapi pengukuran jumlah rapat dinilai kurang efektif karena hanya berfokus pada kinerja keuangan perusahaan (Hasanah et al., 2017). Oleh karena itu pembahasan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan tidak diutamakan. Lalu, pengukuran jumlah anggota tidak mencerminkan kinerja dewan dan komite perusahaan secara keseluruhan (Idah, 2013). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menggunakan pergantian anggota sebagai pengukuran kinerja tata kelola perusahaan.

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pergantian dewan menyatakan bahwa dengan adanya pergantian dewan menunjukkan kinerja perusahaan memburuk dan perusahaan menjadi lebih berisiko (Aharony et al., 2015; Asthana & Balsam, 2010; Chang, 2016). Sehingga dengan adanya pergantian dewan, perusahaan melakukan penataan ulang kembali struktur manajemen dan meningkatkan mekanisme pengawasan sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang semakin baik (Larcker & Tayan, 2011).

Menurut Pratiwi & Laksito (2014) pergantian dewan memberikan gagasan baru untuk menyatukan pandangan dan pengetahuan serta memberi sinyal kepada *stakeholders* bahwa operasi perusahaan dalam pengawasan. Sehingga dengan munculnya gagasan serta pengetahuan baru maka perusahaan dapat mulai berbenah diri. Salah satunya adalah dengan mulai memperbanyak pembahasan mengenai laporan keberlanjutan, apabila pada sebelum pergantian dewan pembahasan mengenai pengungkapan laporan keberlanjutan tidak diutamakan. Maka dengan adanya pergantian dewan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan oleh perusahaan-perusahaan.

Dalam melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan, dewan direksi memiliki tanggung jawab atas penyusunan laporan keberlanjutan sedangkan dewan komisaris berwenang untuk menyetujui laporan keberlanjutan tersebut. Sehingga diperlukan dewan direksi dan komisaris yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Apabila dewan direksi dan komisaris dirasa kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan dan pengawasan perusahaan maka akan membuat pemegang saham melakukan tindakan korektif yaitu pergantian anggota dengan menambah atau mengurangi dewan direksi dan komisaris (Liu et al., 2013).

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada studi mengenai pergantian dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan untuk membuktikan adanya pengaruh dari pergantian dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Tinjauan Literatur Dan Pengembangan Hipotesis

Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang memaparkan hubungan keagenan sebagai kontrak kerja pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (*principal*) kepada pihak lain yang dipekerjakan (*agent*). Di negara-negara berkembang kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi dan konflik tata kelola perusahaan sebagian besar timbul kepada pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Banchit

& Locke, 2016; Chen & Young, 2010; Putra & Arif, 2017; Young et al., 2008). Konflik *principal-principal* tersebut terjadi ketika pemegang saham mayoritas menggunakan kekuatan suara mereka untuk mengontrol perusahaan dan mengambil manfaat pribadi dari kontrol tersebut (Banchit & Locke, 2016; Renders & Gaeremynck, 2012). Hubungan yang terjalin oleh pemegang saham mayoritas dan manajer perusahaan yang terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas, maka pemegang saham mayoritas berada dalam posisi menguntungkan karena dapat mengambil manfaat berupa informasi dari manajemen dimana pada saat yang sama dapat mempengaruhi hasil perusahaan karena hak suara mereka yang kuat (Banchit & Locke, 2011; Young et al., 2008).

Teori Stakeholder

Teori *Stakeholder* diperkenalkan oleh Freeman et al. (2010). *Stakeholder* merupakan orang maupun kalangan tertentu yang dapat memengaruhi tujuan suatu perusahaan. Menurut teori *stakeholder*, perusahaan selain bertujuan untuk memperoleh keuntungan tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Pratama & Yulianto, 2015). Teori *stakeholder* menjunjung tinggi akuntabilitas organisasi dibanding kinerja keuangan. Sehingga perusahaan terdorong untuk mengungkapkan informasi yang bersangkutan dengan kinerja lingkungan dan sosial sesuai dengan harapan stakeholder yang diwujudkan dalam laporan keberlanjutan (Diono et al., 2017). Dengan pengungkapan laporan keberlanjutan diharapkan informasi yang dibutuhkan *stakeholder* terpenuhi serta pengelolaan *stakeholder* lebih baik sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin (Dewi & Pitriasari, 2019; Khafid & Mulyaningsih, 2017).

Teori Legitimasi

Teori legitimasi diperkenalkan oleh Dowling & Pfeffer (1975). Teori legitimasi didasari atas kontrak sosial perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan (Diono et al., 2017). Namun terkadang terdapat pertentangan antara pandangan perusahaan dengan pandangan masyarakat yang kerap dimaknai sebagai "*legitimacy gap*" (Lindawati & Puspita, 2015). Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi *legitimacy gap* yaitu meningkatkan kesesuaian operasi perusahaan dengan ekspektasi masyarakat yang diwujudkan dalam pengungkapan laporan keberlanjutan berupa tanggung jawab lingkungan, sosial, dan ekonomi perusahaan (Adhipradana & Daljono, 2014). Kesadaran perusahaan mengenai permasalahan lingkungan maupun sosial merupakan bagian dari kelangsungan hidup perusahaan. Pengungkapan laporan keberlanjutan merupakan konsekuensi logis atas pelaksanaan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pengungkapan yang dilangsungkan oleh perusahaan menghasilkan keuntungan berupa legitimasi sosial yang dapat memaksimalkan kekuatan keuangan secara jangka panjang, yang pada akhirnya perusahaan akan tetap *going concern* (Khafid & Mulyaningsih, 2017).

Pergantian Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Dewan komisaris bertugas melayani pemegang saham dengan mengawasi kinerja perusahaan serta memberikan saran mengenai keputusan penting (Bereskin & Smith, 2014; Dah et al., 2014). Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh kepada manajemen agar

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

memperluas pengungkapan informasi, salah satunya adalah pengungkapan laporan keberlanjutan (Solikhah & Winarsih, 2016). Selain itu dewan komisaris memiliki tanggung jawab untuk menyetujui laporan keberlanjutan. Sehingga dewan komisaris berkewajiban memastikan bahwa pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, apabila pada komposisi dewan komisaris kurang memahami mengenai pengungkapan keberlanjutan, maka diperlukan adanya penambahan anggota dewan komisaris yang mempunyai pengetahuan dan keahlian mengenai pengungkapan keberlanjutan. Penambahan anggota komisaris perusahaan menggunakan mekanisme yang diterima secara normatif untuk mendapatkan hasil yang positif atas penambahan komisaris serta mencapai tujuan penting perusahaan berkaitan pengungkapan keberlanjutan (Garg et al., 2017).

Tetapi di sisi lain, ketika dewan komisaris mengetahui bahwa mereka terhubung dengan sisi yang kurang baik maka mereka akan berupaya memitigasi ancaman tersebut yang salah satunya adalah dengan melakukan pengurangan anggota komisaris. Cara tersebut digunakan oleh dewan untuk secara implisit menyalahkan individu tertentu. Bentuk pengkambinghitaman yang halus ini dapat membantu melindungi perusahaan dan para dewan yang tersisa dari dampak yang merugikan. Hal tersebut dapat ditunjukkan apabila terdapat komisaris yang tidak memiliki perhatian atas pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan, yang pada masa depan dapat mempengaruhi perusahaan atas pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan (Marcel, Cowen, & Ballinger, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mempercayai bahwa penambahan dewan komisaris dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan penataan ulang struktur manajemen yang dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik serta memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan bahwa operasi perusahaan dalam pengawasan yang baik oleh komisaris (Larcker & Tayan, 2011; Liu et al., 2013; Pratiwi & Laksito, 2014).

H1: Penambahan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

H2: Pengurangan dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pergantian Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Struktur tata kelola perusahaan yang baik sejalan dengan peningkatan atas pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Mengingat dewan direksi adalah pemain utama dalam tata kelola perusahaan. Dengan adanya penambahan anggota dewan direksi akan berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, karena adanya penambahan anggota dewan yang terdiri dari latar belakang yang baru, nilai yang berbeda, persepsi baru mengenai keberlanjutan, serta pengalaman dan keahlian akan berpotensi untuk mempengaruhi manajemen dalam melakukan pengungkapan laporan keberlanjutan (Rao & Tilt, 2016).

Di sisi lain, pengurangan anggota dewan direksi menunjukkan bahwa kurangnya keahlian dewan direksi yang dapat menyebabkan lemahnya pengelolaan perusahaan, hal tersebut salah satunya adalah kurangnya keahlian direksi terhadap pelaporan keberlanjutan.

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Sehingga pemegang saham pada RUPS merasa perlu melakukan pengurangan terhadap direksi yang kurang memahami pelaporan keberlanjutan. Karena saat ini pengungkapan keberlanjutan mulai diwajibkan atas terbitnya peraturan mengenai keberlanjutan, sehingga selama masa adopsi direksi dianggap berada dalam situasi yang sama dan diharapkan untuk menerapkan peraturan tersebut dengan lebih baik. Direktur yang tidak memiliki keahlian dalam menerapkan peraturan baru atas pengungkapan keberlanjutan kemungkinan akan digantikan (Irianto & Anugerah, 2018).

Pada penelitian ini, peneliti mempercayai bahwa penambahan dewan direksi dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya penambahan anggota dewan direksi menjadi upaya perusahaan untuk memperbaiki kinerja direksi yang diwujudkan melalui perubahan susunan ataupun perekrutan anggota baru yang dianggap lebih berkompeten dari komposisi sebelumnya, yang pada akhirnya apabila kinerja direksi meningkat maka akan meningkatkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Devi et al., 2017).

H3: Penambahan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

H4: Pengurangan dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pergantian Komite Audit terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris menjalankan tugas pengawasan kegiatan operasional perusahaan. Mengacu pada teori *stakeholder*, perusahaan bertujuan memuaskan harapan para *stakeholder* dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan sehingga akan memperoleh legitimasi dari masyarakat (Sinaga & Fachrurrozie, 2017).

Bertambahnya anggota komite audit dapat memberikan pengalaman yang lebih beragam kepada komposisi komite audit sehingga efektivitas komite audit meningkat serta menempatkan komite pada posisi yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah potensial terkait proses pelaporan. Selain itu, penambahan anggota komite audit yang memiliki semangat serta dedikasi terhadap sumber daya alam dapat menjamin pemantauan operatif sehingga dapat menyelesaikan masalah dan dilema dalam proses pelaporan perusahaan terkait pelaporan keberlanjutan (Buallay & Al-Ajmi, 2018).

Selain itu pengurangan anggota komite audit didasari atas ketidakefektifannya dalam melaksanakan pemantauan. Jika ketidakefektifan komite audit tersebut mengancam persepsi legitimasi organisasi, maka pengurangan anggota komite audit bertindak sebagai “norma yang dilembagakan” untuk memulihkan ancaman tersebut. Selain itu, pengurangan komite audit dapat dipengaruhi oleh karakteristik individu tersebut, jika kaitannya terhadap fungsi pemantauan atas pelaporan yang dilakukan perusahaan maka diperlukan individu yang memenuhi karakteristik berupa kemampuan atas berbagai macam pelaporan yang dilakukan perusahaan yang salah satunya merupakan laporan keberlanjutan. Jika komite audit tidak memenuhi karakteristik atas pemantauan pelaporan keberlanjutan maka perlu adanya pengurangan komite audit (Kachelmeier, Rasmussen, & Schmidt, 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti mempercayai bahwa penambahan komite audit dapat memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Dengan adanya penambahan anggota pada dewan pengawas perusahaan seperti komite audit dapat meningkatkan efektivitas pemantauan internal serta menempatkan fungsi pengawasan pada

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

posisi yang lebih baik terkait masalah potensial yang berupa pelaporan baik keuangan maupun non-keuangan seperti laporan keberlanjutan (Buallay & Al-Ajmi, 2018; Shamil et al., 2014).

H5: Penambahan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

H6: Pengurangan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Pergantian Dewan Direksi Independen terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Keberadaan dewan direksi independen pada tata kelola perusahaan dapat mengurangi masalah keagenan serta meningkatkan kualitas pemantauan, sehingga memberikan tekanan kepada manajer untuk memperluas pengungkapan informasi seperti pengungkapan laporan keberlanjutan (Shamil et al., 2014).

Penambahan dewan direksi independen dapat meningkatkan pemantauan internal sehingga memberikan tekanan pada manajer untuk lebih bertanggung jawab atas kinerja perusahaan serta mengungkapkan lebih banyak informasi seperti pengungkapan terkait keberlanjutan (Shamil et al., 2014). Penambahan dewan direksi independen mempertimbangkan kemampuan dan pengetahuannya yang sejalan dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini perusahaan-perusahaan berbenah diri atas kontribusinya terhadap lingkungan, sehingga dengan adanya penambahan dewan direksi independen yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sejalan dengan kebutuhan perusahaan tersebut maka fungsi pemantauan direksi independen terkait pelaporan yang dilakukan perusahaan dapat berjalan dengan efektif.

Namun di sisi lain, pengurangan direksi independen terjadi untuk menghilangkan direksi independen yang memiliki pengetahuan yang kurang terkait pengungkapan yang cenderung menarik perhatian publik yaitu pengungkapan lingkungan. Selain itu pengurangan direktur independen dimotivasi oleh kekhawatiran reputasi untuk keluar dari perusahaan agar tidak terkait dengan publisitas negatif yang dihasilkan (Aharony et al., 2015).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti mempercayai bahwa penambahan dewan direksi independen dapat meningkatkan pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan. Dengan adanya penambahan pada dewan direksi independen dapat membawa perspektif yang luas dan heterogen ke dalam proses pengambilan keputusan yang mengarah pada pemecahan masalah yang lebih berkualitas terkait keputusan penting seperti pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan (Garg et al., 2017).

H7: Penambahan direksi independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

H8: Pengurangan direksi independen berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Metode Penelitian

Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data

Sampel penelitian ini adalah perusahaan sektor finance pada periode 2016-2018, yang terdiri dari 135 perusahaan-tahun (45 perusahaan x 3 tahun). Pada penelitian ini menggunakan

Novitasari, Putra & Saebani
Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel dengan menggunakan kriteria tertentu yang telah ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2009, p. 122).

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria	Observasi
Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2018.	48
Perusahaan sektor keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2016-2018	(1)
Perusahaan sektor keuangan yang mengungkapkan data secara tidak lengkap sesuai kebutuhan dalam penelitian ini	(2)
Perusahaan sektor keuangan yang memenuhi kriteria	45
Tahun penelitian	3
Total Sampel	135

Sumber : Data diolah (2020)

Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Pengungkapan laporan keberlanjutan adalah pengungkapan kegiatan perusahaan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada para stakeholder atas kinerjanya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Pratama & Yulianto, 2015). Pengukuran Laporan Keberlanjutan dinyatakan berdasarkan Sustainability Report Index (SRI). SRI diukur berdasarkan pengungkapan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) dibandingkan dengan standar pedoman keberlanjutan GRI (Global Reporting Initiative) G4. Pengukuran dilakukan dengan melihat setiap item yang diungkapkan oleh perusahaan dari tiga indikator tersebut. Masing-masing item diberi nilai 1 jika diungkapkan dan 0 jika tidak diungkapkan, selanjutnya nilai dari setiap indikator dijumlahkan untuk memperoleh nilai besarnya SR secara keseluruhan dari setiap perusahaan. Setelah nilai SR secara keseluruhan didapat kemudian dibandingkan dengan pedoman standar pelaporan GRI G4 sehingga diperoleh nilai SRI.

Formula 1. Pengukuran Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

$$SRI = \frac{\text{Jumlah Sustainability Report Disclosure yang diungkapkan}}{\text{Sustainability Report Disclosure menurut GRI G4}}$$

Pergantian Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

Pergantian dewan komisaris dan dewan direksi terdiri dari pergantian dewan komisaris, pergantian dewan direksi, pergantian komite audit, dan pergantian dewan direksi independen. Pergantian diukur melalui dua rumus yaitu penambahan dan pengurangan anggota. Penambahan ialah jumlah penambahan dewan komisaris dan dewan direksi pada tahun berjalan di luar anggota dewan komisaris dan dewan direksi yang ada pada tahun

Novitasari, Putra & Saebani
Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

sebelumnya. Sementara pengurangan ialah jumlah pengurangan dewan komisaris dan dewan direksi pada tahun berjalan dari dewan komisaris dan dewan direksi yang ada pada tahun sebelumnya.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, book to market ratio, firm size, sub sektor, dan year control. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Asset (ROA) menurut Marwati & Yulianti (2015), Leverage diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) menurut Aniktia & Khafid (2015), Market to Book Ratio diukur dengan membandingkan harga saham dengan nilai buku menurut Candra & Juniarti (2017), selanjutnya Firm size diukur menggunakan logaritma natural dari total aset menurut Anggiyani & Yanto (2016).

Formula 2. Pengukuran Variabel Kontrol

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aset}}$$

$$DER = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}}$$

$$\text{Market to Book Ratio} = \frac{\text{Market Value}}{\text{Book Value}}$$

$$\text{Firm Size} = \text{Ln}(\text{Total aset})$$

Penelitian ini menggunakan Sub Sektor usaha terkait sektor keuangan terdiri dari lima sub sector yang meliputi (1) Bank, (2) Financial Instituion, (3) Securities Company, (4) Insurance, dan (5) Others. Penelitian ini juga menggunakan *Year control*.

Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model persamaan regresi data panel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} SRI_{it} = & \alpha + \beta_1 AddMC_{it} + \beta_2 LessMC_{it} + \beta_3 AddMBOD_{it} + \beta_4 LessMBOD_{it} \\ & + \beta_5 AddMAC_{it} + \beta_6 LessMAC_{it} + \beta_7 AddMIBOD_{it} + \beta_8 LessMIBOD_{it} \\ & + \delta_1 DER_{it} + \delta_2 ROA_{it} + \delta_3 BTM_{it} + \delta_4 SIZE_{it} + \theta_{1-4} SubSectors \\ & + \theta_{5-6} YearControls + \varepsilon \end{aligned}$$

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Keterangan

No	Variabel	Penjelasan	Sumber
1	SRI_{it}	Total pengungkapan keberlanjutan pada perusahaan i pada tahun t dibagi total pengungkapan yang diharapkan sesuai dengan GRI G4	Laporan Keberlanjutan Laporan Keuangan Tahunan
2	$AddMC_{it}$	Jumlah penambahan anggota dewan komisaris pada perusahaan i pada tahun t di luar dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
3	$LessMC_{it}$	Jumlah pengurangan anggota dewan komisaris pada perusahaan i pada tahun t dari dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
4	$AddMBOD_{it}$	Jumlah penambahan anggota dewan direksi pada perusahaan i pada tahun t di luar dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
5	$LessMBOD_{it}$	Jumlah pengurangan anggota dewan direksi pada perusahaan i pada tahun t dari dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
6	$AddMAC_{it}$	Jumlah penambahan anggota komite audit pada perusahaan i pada tahun t di luar dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
7	$LessMAC_{it}$	Jumlah pengurangan anggota komite audit pada perusahaan i pada tahun t dari dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
8	$AddMIBOD_{it}$	Jumlah penambahan anggota dewan direksi independen pada perusahaan i pada tahun t di luar dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
9	$LessMIBOD_{it}$	Jumlah pengurangan anggota dewan direksi independen pada perusahaan i pada tahun t dari dewan komisaris pada tahun t-1	Laporan Keuangan Tahunan
10	DER_{it}	total liabilitas dibagi total ekuitas perusahaan i pada tahun t	Laporan Keuangan Tahunan
11	ROA_{it}	laba bersih setelah pajak dibagi total aset perusahaan i pada tahun t	Laporan Keuangan Tahunan
12	BTM_{it}	total book value dibagi total market value perusahaan i pada tahun t	Laporan Keuangan Tahunan
13	$SIZE_{it}$	logaritma natural total aset perusahaan i pada tahun t	Laporan Keuangan Tahunan
14	Sub Sector	<i>Bank, Financial Institution, Securities Company, Insurance, dan Others</i>	Bursa Efek Indonesia

Hasil Dan Pembahasan

Statistik Deskriptif

Tabel 3 menunjukkan hasil dari statistik deskriptif pada penelitian ini dengan jumlah sampel untuk setiap variabel sebanyak 135 sampel perusahaan sektor keuangan yang didapat dari laporan keuangan, laporan tahunan, serta laporan keberlanjutan tahun 2016-2018.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs.	Std. Deviation	Mean	Min.	Max.
Panel A – Data Nominal					
SRI	135	0,0930	0,1051	0,0110	0,6813
AMC	135	1,0809	0,6962	0,0000	5,0000
LMC	135	0,4764	0,1629	0,0000	3,0000
AMBOD	135	1,2664	1,0222	0,0000	4,0000
LMBOD	135	0,7347	0,3408	0,0000	4,0000
AMAC	135	1,0889	0,7260	0,0000	5,0000
LMAC	135	0,4130	0,1260	0,0000	2,0000
AMIBOD	135	0,2503	0,0667	0,0000	1,0000
LMIBOD	135	0,1480	0,0222	0,0000	1,0000
DER	135	2,8629	4,6682	0,0368	14,7485
ROA	135	0,3389	0,0143	-0,1483	0,1091
BTM	135	1,5477	1,3486	0,0482	12,0346
Size	135	1,9560	30,9698	26,8800	34,7988
Panel B – Data Dummy					
	Proporsi Dummy = 0		Proporsi Dummy = 1		
	Obs.	%	Obs.	%	
S1	48	35,56	87	64,44	
S2	120	88,89	15	11,11	
S3	123	91,11	12	8,89	
S4	123	91,11	12	8,89	
S5	126	93,33	9	6,67	

Catatan:

SRI = total pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan dibagi total pengungkapan yang diharapkan di tahun berjalan; AMC = jumlah penambahan anggota dewan komisaris dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; LMC = jumlah pengurangan anggota dewan komisaris dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; AMBOD = jumlah penambahan anggota dewan direksi dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; LMBOD = jumlah pengurangan anggota dewan direksi dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; AMAC = jumlah penambahan anggota komite audit dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; LMAC = jumlah pengurangan anggota komite audit dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; AMIBOD = jumlah penambahan anggota dewan direksi independen dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; LMIBOD = jumlah pengurangan anggota dewan direksi independen dibandingkan tahun sebelumnya pada perusahaan; DER = total liabilitas dibagi total ekuitas perusahaan di tahun berjalan; ROA = laba bersih setelah pajak dibagi total aset perusahaan di tahun berjalan; BTM = total book value dibagi total market value perusahaan di tahun berjalan; Size = logaritma natural total aset perusahaan di tahun berjalan; S1 = perusahaan terdaftar pada sub sektor *Bank*; S2 = perusahaan terdaftar pada sub sektor *Financial Institution*; S3 = perusahaan terdaftar pada sub sektor *Securities Company*; S4 = perusahaan terdaftar pada sub sektor *Insurance*; S5 = perusahaan terdaftar pada sub sektor *Others*.

Sumber : Data Diolah (2020)

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Variabel dependen pada penelitian ini adalah pengungkapan laporan keberlanjutan (SRI). Berdasarkan Tabel 3 di atas variabel SRI mempunyai nilai terendah sebesar 0,0110 yang berasal dari beberapa perusahaan yaitu Asuransi Kresna Mitra Tbk. (ASMI) pada tahun 2017 dan 2018, Bank Oke Indonesia Tbk. (DNAR) pada tahun 2016, Paninvest Tbk. (PNIN) tahun 2016, 2017, dan 2018, Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) tahun 2016 dan 2017, serta Victoria Investama Tbk. (VICO) tahun 2016. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel SRI yaitu sebesar 0,6813 yang berasal dari Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada tahun 2016. Nilai rata-rata SRI yaitu 0,1051 yang berarti bahwa pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan sektor keuangan baru mencapai 10% dari standar GRI G4. Nilai standar deviasi pengungkapan laporan keberlanjutan sebesar 0,0930 yang berarti data pengungkapan laporan keberlanjutan menyimpang sebesar 0,0930 dari nilai rata-rata sebesar 0,1051.

Hasil Regresi Linier Berganda

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS). Sebelum dilakukan pengujian, peneliti melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dari hasil uji tersebut terbukti bahwa data terdistribusi secara normal dan tidak ada masalah dengan multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan otokorelasi serta tidak terdapat outlier dalam data. Sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke analisis regresi.

Tabel 4. Analisis Regresi

SRI n=135	Model 1 Coeff.	Model 2 Coeff.	Model 3 Coeff.	Model 4 Coeff.	Model 5 Coeff.	Model 6 Coeff.	Model 7 Coeff.
Cons.	-0,7803	-0,7869	-0,7433	-0,8718	-0,6835	-0,8618	-0,7066
AMC	0,0157**				0,0026		0,0054
LMC	-0,0806					-0,0082	-0,0046
AMBOD		0,0111*			0,0077		0,0068
LMBOD		-0,0111				-0,0128	-0,0120
AMAC			0,0222***		0,0192***		0,0188***
LMAC			-0,0140			-0,0047	-0,0130
AMIBOD				0,0079	0,0062		0,0061
LMIBOD				0,0347		0,0360	0,0260
DER	0,0019	0,0016	0,0022	0,0018	0,0026	0,0013	0,0021
ROA	-0,0804	-0,0500	0,0076	-0,1372	0,0356	-0,1133	0,0432
BTM	-0,0020	-0,0006	-0,0011	-0,0005	-0,0016	0,0000	-0,0010
Size	0,0269***	0,0270***	0,0538***	0,0300***	0,0231***	0,0301***	0,0239***
S1	0,0317	0,0289	0,0365	0,0302	0,0300	0,0365	0,0357
S2	0,0426	0,0377	0,0408	0,0392	0,0373	0,0405	0,0420
S3	0,0647	0,0597	0,0660*	0,0686*	0,0607*	0,0663*	0,0606
S4	0,0246	0,0139	0,0117	0,0175	0,0125	0,0127	0,0076
F	7,1900	7,1100	8,1800	6,4500	7,1300	6,4500	5,6400
Prob > F	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
R-squared	0,4143	0,4115	0,4458	0,3880	0,4539	0,3883	0,4665
Adj R-squared	0,3567	0,3536	0,3913	0,3278	0,3902	0,3281	0,3887

Catatan:

Deskripsi variabel sama seperti deskripsi sebelumnya.

*** signifikan pada 1%, ** signifikan pada 5%, * signifikan pada 10%

Data diolah (2020)

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Peneliti melakukan penelitian menggunakan 7 model yang terdiri dari Model 1-4 yaitu menguji masing-masing pergantian terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, lalu Model 5 yaitu menguji masing-masing penambahan anggota terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, sedangkan Model 6 menguji masing-masing pengurangan anggota terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan, serta Model 7 yaitu seluruh variabel yakni pergantian terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ketujuh Model, diketahui bahwa hasil pada penelitian ini yang robust terhadap ketujuh Model tersebut adalah AMAC atau penambahan komite audit yang robust pada ketiga kali pengujian yang bersangkutan yaitu pada Model 3, 5, dan 7 yang berpengaruh terhadap SRI dengan tingkat signifikansi 1%. Selanjutnya, variabel Size juga robust pada ketujuh kali pengujian yang bersangkutan dan berpengaruh signifikan terhadap SRI dengan tingkat signifikansi 1%. Adapun variabel AMC atau penambahan dewan komisaris juga berpengaruh terhadap SRI pada Model 1 dengan tingkat signifikansi 10%, lalu variabel AMBOD atau penambahan dewan direksi yang pada Model 2 berpengaruh terhadap SRI dengan tingkat signifikansi 1%.

Penambahan Dewan komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penambahan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Standar tata kelola perusahaan menekankan pada pentingnya perekrutan dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit yang memiliki pengetahuan serta kompetensi yang kuat guna memahami kompleksitas bisnis perbankan (D'Amato & Gallo, 2019). Dengan dilakukan perubahan susunan dewan perusahaan melalui perekrutan anggota baru yang dianggap lebih berkompeten dari komposisi sebelumnya maka akan meningkatkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan (Dewi & Pitriasari, 2019; Irianto & Anugerah, 2018).

Penambahan dewan komisaris dan direksi yang berasal dari pihak profesional memberikan pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan, karena dewan komisaris dan dewan direksi memainkan peran krusial dalam tata kelola perusahaan serta pengambil keputusan utama yang bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan (Larcker & Tayan, 2011). Sehingga dengan direkrutnya pihak yang profesional akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat yang salah satunya kebijakan terkait pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Terkait fungsi pengawasan yang dilakukan komite audit, terdapat peningkatan tanggung jawab komite audit dalam proses pelaporan perusahaan, dari fokus tradisional pada pelaporan keuangan ke proses pelaporan non-keuangan. Mengingat peran komite audit yang semakin meluas keahlian keuangan saja tidak cukup untuk praktik pelaporan organisasi yang lebih luas, maka komite audit memerlukan keahlian lain seperti industri, hukum, dan tata kelola untuk secara efektif memantau praktik pelaporan organisasi yang lebih luas (Abdifatah & Mutalib, 2016). Peran komite audit yang diperluas dari pelaporan keuangan hingga berkaitan dengan tata kelola perusahaan secara umum seperti mengawasi dan mengkoordinasikan fungsi audit internal dan eksternal serta memantau kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum dan peraturan maka dengan adanya penambahan komite audit dapat memberikan pengalaman yang berbeda dan baru serta keterampilan yang diperlukan

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

anggota komite audit yang pada akhirnya akan meningkatkan peran sosial organisasi dalam konteks keberlanjutan (Porter, 2009). Selain itu, komite audit juga memiliki peran dalam memantau kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum dan peraturan, maka dengan penambahan anggota komite audit dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan yang diterbitkan pemerintah yaitu POJK No 51 tentang keuangan berkelanjutan yang mewajibkan seluruh sektor keuangan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan.

Hasil penelitian ini, tidak sejalan dengan (Kabila & Suryani, 2019) yang menyatakan bahwa dibutuhkannya waktu untuk beradaptasi atas penambahan komisaris dan direksi perusahaan sehingga kinerja awal yang tidak maksimal. Hal tersebut tidak mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan, karena setelah dilakukannya penambahan anggota maka perusahaan akan melakukan orientasi penuh mengenai tanggung jawab baik dewan komisaris, dewan direksi, maupun komite audit. Selain itu, pihak yang direkrut memiliki latar belakang keuangan sehingga tidak memerlukan adaptasi yang lama karena orang-orang tersebut berkemampuan dibidang keuangan maka kinerja keuangan maupun non-keuangan tidak akan terganggu.

Penambahan Dewan Direksi Independen terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Hasil pada penelitian ini menunjukkan penambahan dewan direksi independen tidak mempengaruhi pelaporan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia sendiri peran direksi independen kurang maksimal karena sebenarnya konsep direksi independen lebih dikenal di negara-negara yang sistem pengelolaan perusahaan yang mengadopsi *One Tier System*, sedangkan di Indonesia mengadopsi *Two Tier System*, sehingga terdapat persepsi bahwa konsep direksi independen yang dianut pada *One Tier System* sudah ada pada *Two Tier System* yaitu komisaris independen (Supriatna & Ermond, 2019). Oleh karena itu, apabila diberlakukan direksi independen maka fungsi pengawasan atas kinerja direksi terbagi menjadi dua pihak independen.

Wewenang direksi independen sendiri kurang maksimal karena hanya bertugas untuk memastikan adanya perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham. Meskipun fungsi seorang direksi independen adalah mengoreksi dan membenarkan atas kebijakan dan operasional yang dijalankan perusahaan, tetapi keputusan untuk kepentingan perusahaan dilakukan oleh direksi. Maka pihak yang melakukan kontrol terhadap direksi harus pihak yang berasal dari luar direksi, dimana sudah ada fungsi pengawasan dari komisaris independen dan komite audit (Khameswary, 2019).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Devi et al., 2017) yang menyatakan bahwa penambahan anggota pada dewan direksi menjadi upaya untuk memperbaiki kinerja sehingga dengan melakukan perekrutan anggota baru maka akan meningkatkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan. Hal tersebut tidak berlaku pada penambahan anggota dewan direksi independen karena wewenang direksi independen sendiri yang kurang maksimal maka adanya penambahan anggota tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan perusahaan.

Pengurangan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Direksi Independen terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Pengurangan anggota merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam melakukan pergantian baik untuk dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, maupun dewan direksi independen. Pengurangan anggota merupakan salah satu upaya mitigasi ancaman ketika dewan perusahaan merasa terhubung dengan sisi yang kurang baik yang dapat melindungi perusahaan dan para dewan yang tersisa dari dampak yang merugikan, sehingga pengungkapan yang telah dilakukan perusahaan akan tetap berjalan dan menjadi lebih baik (Marcel et al., 2017). Selain itu, dengan terbitnya peraturan atas pengungkapan keberlanjutan perusahaan, maka selama masa adopsi para dewan dianggap berada dalam situasi yang sama yang diharapkan dapat menerapkan peraturan tersebut dengan baik. Direktur yang tidak memiliki keahlian dalam menerapkan peraturan baru atas pengungkapan keberlanjutan kemungkinan akan digantikan (Irianto & Anugerah, 2018). Jika berkaitan dengan fungsi pemantauan atas pelaporan yang dilakukan perusahaan maka diperlukan individu yang memenuhi karakteristik berupa kemampuan atas berbagai macam pelaporan yang dilakukan perusahaan yang salah satunya merupakan laporan keberlanjutan, apabila pada suatu individu tidak memenuhi karakteristik atas pemantauan pelaporan keberlanjutan maka perlu adanya pengurangan (Kachelmeier et al., 2016).

Tetapi di saat yang sama, pengurangan anggota dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan direksi independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan karena apabila dalam komposisi dewan perusahaan memang tidak ada dewan yang memiliki perhatian atau minat terhadap pengungkapan keberlanjutan dan pengurangan anggota tersebut memang ditujukan untuk menghilangkan dewan perusahaan yang kinerjanya tidak baik maka pengurangan dewan perusahaan tersebut tidak berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan (Larcker & Tayan, 2011). Pengurangan anggota bagi dewan perusahaan dapat pula dimaksudkan untuk mengurangi ukuran dewan yang terlalu besar sehingga proses dewan perusahaan dalam pengambilan keputusan menjadi sulit yang salah satunya dapat berdampak pada keputusan atas pengungkapan yang dilakukan perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit dan dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh motivasi pemegang saham tidak pada pengungkapan keberlanjutan. Di mana pengungkapan keberlanjutan di Indonesia masih rendah, dari total 629 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya 110 perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (Liputan6.com, 2019). Berdasarkan infografis yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga jasa keuangan dan emiten penerbit sustainability report tahun 2017 menunjukkan bahwa sektor keuangan merupakan sektor yang tertinggi dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dibandingkan sektor-sektor lain, tetapi hasil rata-rata pengungkapan laporan keberlanjutan pada penelitian ini yaitu berkisar 0.1051 yang berarti rata-rata perusahaan sektor keuangan hanya menerbitkan 9 pengungkapan dari 91 item pengungkapan keberlanjutan menurut GRI. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan di Indonesia masih sangat rendah dan para pemegang saham belum memiliki perhatian terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Pergantian Dewan Komisaris Dan Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Laporan Keberlanjutan

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan Larcker & Tayan (2011) yang mengemukakan bahwa pengurangan anggota dewan perusahaan dimaksudkan untuk menghilangkan dewan yang memiliki kinerja yang buruk dan perusahaan ingin melakukan penyegaran pada susunan komisaris maupun direksi. Meskipun telah dilakukannya pengurangan untuk meningkatkan efektivitas, apabila pada dewan komisaris dan dewan direksi memang tidak memiliki perhatian atau minat terhadap pengungkapan keberlanjutan maka tidak akan mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan yang dilakukan perusahaan.

Namun di sisi lain, hasil penelitian ini tidak sejalan (Marcel et al., 2017) yang mengatakan bahwa pengurangan anggota menjadi upaya mengurangi sisi yang kurang baik dari dewan perusahaan dan melindungi dewan yang tersisa dari dampak yang merugikan. Meskipun telah dilakukannya pengurangan anggota dewan perusahaan untuk mengurangi kinerja dewan yang buruk tetapi jika pada susunan dewan perusahaan dan pemegang saham tidak memiliki motivasi maupun minat terhadap pengungkapan keberlanjutan maka tidak akan berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan perusahaan.

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk melakukan pengujian apakah terdapat hubungan yang terjadi antara pergantian dewan komisaris dan dewan direksi terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Pergantian dewan komisaris dan dewan direksi diukur menggunakan penambahan anggota dan pengurangan anggota. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Didapatkan beberapa simpulan dari penelitian ini yaitu penambahan dewan komisaris dan dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penambahan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan secara parsial maupun simultan. Penambahan dewan direksi independen, pengurangan dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan dewan direksi independen, tidak berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, variabel kontrol yaitu *firm size* berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan.

Keterbatasan dan Saran

Peneliti menemukan keterbatasan yaitu penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor keuangan, sehingga model atau pengukuran dari penelitian ini tidak relevan dengan sektor lain. Berdasarkan keterbatasan yang dikemukakan diatas, saran yang dapat diberikan kepada peneliti berikutnya dapat melanjutkan penelitian dengan model atau pengukuran yang berbeda, serta sektor lain dalam melakukan penelitian seperti manufaktur dan pertambangan yang aktivitas usahanya bersentuhan langsung dengan sumber daya alam sehingga pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan lebih banyak.

Daftar Referensi

- Adhipradana, F., & Daljono. (2014). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(1), 580–589.
- Aharony, J., Liu, C., & Yawson, A. (2015). Corporate litigation and executive turnover. *Journal of Corporate Finance*, 34, 268–292.
- Amran, A., Lee, S. P., & Devi, S. S. (2014). The influence of governance structure and strategic corporate social responsibility toward sustainability reporting quality. *Business Strategy and the Environment*, 23(4), 217–235.
- Anggiyani, S. W., & Yanto, H. (2016). Determinan Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 5(2), 1–10.
- Aniktia, R., & Khafid, M. (2015). Pengaruh Mekaniseme Good Corporate Governance Dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(3), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v4i3.8303>
- Asthana, S., & Balsam, S. (2010). The Impact of Changes in Firm Performance and Risk on Director Turnover. *Review of Accounting and Finance*, 9(3), 244–263.
- Banchit, A., & Locke, S. (2011). Principal-principal cost : Is it a Big Problem in Asean 4 Markets ? *International Review of Business Research Papers*, 7(5), 1–15.
- Banchit, A., & Locke, S. (2016). Conflicts Between Shareholders in ASEAN 5 M&A. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 24(May), 27–46.
- Bereskin, F. L., & Smith, C. W. (2014). Mechanisms of Board Turnover: Evidence From Backdating. *Journal of Applied Corporate Finance*, 26(2), 65–78.
- Beritasatu.com. (2020). CSR Perusahaan Dorong Pencapaian SDGs 2030.
- Buallay, A., & Al-Ajmi, J. (2018). The role of audit committee attributes in corporate sustainability reporting: Evidence from banks in the Gulf Cooperation Council. *Journal of Applied Accounting Research*.
- Candra, A. A., & Juniarti. (2017). Pengaruh Tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Information Asymmetry Dengan Variabel Kontrol Dividend Yield Dan Market-To-Book Ratio Pada Perusahaan Terbuka Di Indonesia. *Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra*, 5(1), 85–97.
- Chang, J.-C. (2016). Reputation and regulation effects on director turnover and change of directorships. *Review of Accounting and Finance*, 15(3), 274–293.
- Chen, Y. Y., & Young, M. N. (2010). Cross-border mergers and acquisitions by Chinese listed companies: A principal-principal perspective. *Asia Pacific Journal of Management*, 27(3), 523–539.
- Dah, M. A., Frye, M. B., & Hurst, M. (2014). Board changes and CEO turnover: The unanticipated effects of the Sarbanes-Oxley Act. *Journal of Banking and Finance*, 41(1), 97–108.
- Dewi, I. P., & Pitriasari, P. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi*, XI(1), 101–118.
- Diono, H., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2017). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate

- Governance, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 615–624.
- Dowling, J., & Pfeffer, J. (1975). Organizational legitimacy: Social values and organizational behavior. *The Pacific Sociological Review*, 18(1), 122–136.
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & Colle, S. de. (2010). *Stakeholder Theory The State of the Art*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Garg, S., Li, Q., & Shaw, J. D. (2017). Undervaluation of Directors in the Board Hierarchy: Impact on Turnover of Directors (and CEOs) in Newly Public Firms. *Strategic Management Journal*, 39(2), 429–457.
- Hasanah, N., Syam, D., & Jati, A. W. (2017). Pengaruh Corporate Governance terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 711–720.
- Idah. (2013). Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Dalam Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 314–322.
- Irianto, D., & Anugerah, N. (2018). The Effect of Financial Expertise on Compensation and Board of Directors Turnover. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 2(1), 51–64.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Kachelmeier, S. J., Rasmussen, S. J., & Schmidt, J. J. (2016). When Do Ineffective Audit Committee Members Experience Turnover? *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 228–260.
- Khafid, M., & Mulyaningsih, M. (2017). Kontribusi Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Publikasi Sustainability Report. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 19(3), 340.
- Larcker, D., & Tayan, B. (2011). *Corporate Governance Matters: A Closer Look At Organizational Choices And Their Consequences*. Upper Saddle River, New Jersey: FT Press.
- Lindawati, A. S. L., & Puspita, M. E. (2015). Corporate Social Responsibility: Implikasi Stakeholder dan Legitimacy Gap dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 1–174.
- Marcel, J. J., Cowen, A. P., & Ballinger, G. A. (2017). Are Disruptive CEO Successions Viewed as a Governance Lapse? Evidence From Board Turnover. *Journal of Management*, 43(5), 1313–1334.
- Marwati, C. P., & Yulianti. (2015). Analisis Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Non-Keuangan Tahun 2009-2013. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 7(2), 167–181.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 Tentang Penerapan Keuangan Bekerlanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.*, (2017).
- Pratama, A., & Yulianto, A. (2015). Faktor Keuangan Dan Corporate Governance Sebagai Penentu Pengungkapan Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1–10.
- Pratiwi, T. R., & Laksito, H. (2014). Perubahan Struktur Dewan Komisaris. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 03(3), 1–8.
- Putra, A. M., & Arif, H. (2017). Board Structure and Earnings Management: Evidence of South East Asia Countries Categorised By Agency Cost Level. *Hasanuddin Economics*

and Business Review, 1(2), 142.

- Rao, K., & Tilt, C. (2016). Board Composition and Corporate Social Responsibility: The Role of Diversity, Gender, Strategy and Decision Making. *Journal of Business Ethics*, 138(2), 327–347.
- Renders, A., & Gaeremynck, A. (2012). Corporate Governance, Principal-Principal Agency Conflicts, and Firm Value in European Listed Companies. *Corporate Governance: An International Review*, 20(2), 125–143. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2011.00900.x>
- Safitri, M., & Saifudin. (2019). Implikasi Karakteristik Perusahaan dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 4(1), 13–25.
- Sari, M. P. Y., & Marsono. (2013). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 2(3), 1–10.
- Shamil, M. M., Shaikh, J. M., Ho, P. L., & Krishnan, A. (2014). The influence of board characteristics on sustainability reporting Empirical evidence from Sri Lankan firms. *Asian Review of Accounting*, 22(2), 78–97.
- Sinaga, K. J., & Fachrurrozie. (2017). The Effect of Profitability, Activity Analysis, Industrial Type and Good Corporate Governance Mechanism on The Disclosure of Sustainability Report. *Accounting Analysis Journal*, 6(3), 347–358.
- Solikhah, B., & Winarsih, A. M. (2016). Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, Dan Struktur Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(1), 1–22.
- Undang-Undang No. 40 Tentang Perseroan Terbatas.*, (2007).
- Young, M. N., Peng, M. W., Ahlstrom, D., Bruton, G. D., & Jiang, Y. (2008). Corporate governance in emerging economies: A review of the principal-principal perspective: Review paper. *Journal of Management Studies*, 45(1), 196–220.